

## **RINGKASAN**

**Nurul Hafilda 217410102004 Interpretasi Hakim Terhadap Penerapan Klausula Baku Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078/K/Pdt/2009)**

**(Dr.Marlia Sastro, S.H., M.Hum dan Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H )**

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu-rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah putusan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan klausula baku dalam perkara Nomor 2078/K/Pdt/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Karena Konsumen dalam kasus tersebut telah melakukan itikad baik yaitu mengikuti aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pengelola parkir maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Disarankan kepada Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pencantuman klausula baku dalam operasional jasa parkir yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha.

**Kata Kunci :** *Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen*

## **SUMMARY**

**Nurul Hafilda 217410102004** *Judges' Interpretation of the Application of Standard Clauses Under the Consumer Protection Law (Study of Supreme Court Decision Number 2078/K/Pdt/2009)*

**(Dr.Marlia Sastro, S.H., M.Hum and Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H)**

*This research discusses the judge's interpretation of the application of standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Interpretation of law by judges in the judicial process must be carried out based on certain principles and principles which become the basis and guidelines for judges in exercising their freedom in discovering and creating law. This research aims to find out and analyze the judge's interpretation of the application of standard clauses based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out and analyze whether the Supreme Court judge's decision regarding the application of standard clauses in case Number 2078/K/Pdt/2009 is appropriate with applicable legal provisions.*

*This research is a normative legal research with a statutory approach and case approach, data obtained from primary data, secondary data and tertiary data and will be analyzed. Then the results of the research will be arranged systematically to obtain clarity of the problems studied.*

*The results of the research explain that the judge's interpretation of the application of standard clauses is that in an agreement it is permissible to include standard clauses, but it is not permissible to include content in the form of transfer of responsibility. The Supreme Court Judge's decision regarding the application of the standard clause in case Number 2078/K/Pdt/2009 is in accordance with applicable legal provisions. Because the consumer in this case has acted in good faith, namely following the rules and regulations imposed by the parking manager, the consumer is entitled to compensation as regulated in Article 4 paragraph (8) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

*It is recommended that the Government should further increase supervision and law enforcement regarding violations of the inclusion of standard clauses in parking service operations which are detrimental to consumers and business actors.*

**Keywords:** *Judge Interpretation, Standard Clauses, Consumer Protection.*